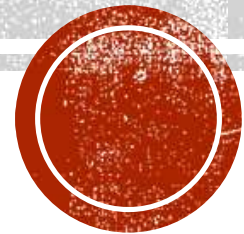


PERBAIKAN TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN PRAKTEK SUAP SEKTOR BUMN

Adnan Topan Husodo

Koordinator Indonesia Corruption Watch



BIAYA SUAP

- Secara global, biaya suap yang harus dibayar individu dan badan hukum sebesar USD 1 triliun (Bank Dunia, 2018)
- Terlibat dalam suap juga membawa denda yang besar bagi perusahaan yang melakukannya (FCPA), sebagai contoh, Vetco (Inggris) membayar denda USD 26 juta karena menyuap otoritas Nigeria untuk memenangkan kontrak
- Suap merusak reputasi perusahaan, dan membutuhkan biaya berlipat-lipat untuk mengembalikan kepercayaan pasar
- Suap membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah di berbagai sektor menjadi sangat rendah



PRAKTEK SUAP-MENYUAP DI INDONESIA

Jenis Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Dakwaan

Dari 919 perkara yang disidangkan sepanjang satu semester tahun 2020, ICW mencoba mengklasifikasikan jenis tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan penuntut umum.



No	Dakwaan	Jumlah Terdakwa
1	Kerugian Keuangan Negara	760
2	Suap-Menyuap	112
3	Pemerasan	32
4	TPPU	13
5	Penggelapan dalam Jabatan	2

Sumber: Tren Vonis ICW, 2020



SUAP DALAM HUKUM TIPIKOR

- Suap adalah jenis korupsi yang paling banyak dirumuskan di dalam UU Tindak Pidana Korupsi RI. Rincian jenis korupsi dalam UU adalah:
 - 2 jenis - Merugikan keuangan negara
 - **12 jenis - Suap**
 - 5 jenis - Penggelapan dlm jabatan
 - 3 jenis - Pemerasan
 - 6 jenis - Perbuatan curang
 - 1 jenis - Benturan kepentingan
 - 1 jenis – Gratifikasi
- Sumber: Amien Sunaryadi (2020)



SUAP DAN PIDANA KORPORASI

Tabel 7. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Jabatan

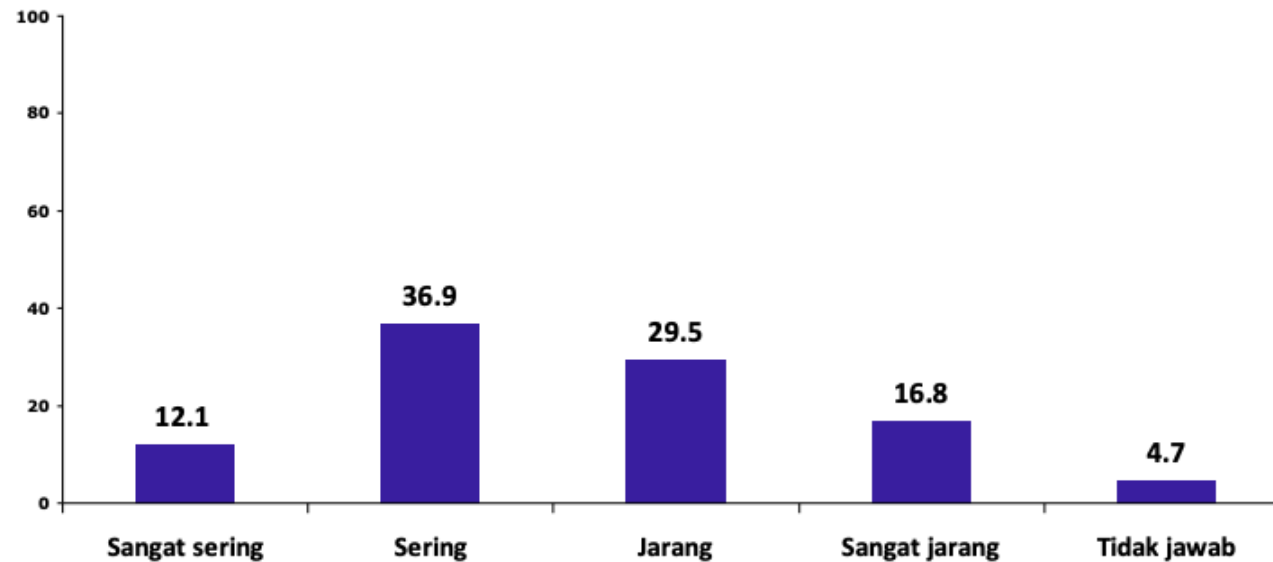
No	Jabatan	Jumlah Tersangka	%
1	Aparatur Sipil Negara	114	30,7
2	Swasta	84	22,6
3	Kepala Desa	47	12,6
4	Direktur Utama/Karyawan Badan Usaha Milik Negara	23	6,2
5	Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23	6,2
6	Aparatur Desa	15	4
7	Direktur Utama/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah	13	3,5
8	Korporasi	13	3,5
9	Masyarakat	11	3
10	Tidak diketahui	7	1,9
11	Ketua/Anggota Organisasi/Kelompok	7	1,9
12	Bupati/Wakil Bupati	4	1,1
13	Non Aparatur Sipil Negara	4	1,1
14	Ketua/Anggota Koperasi	2	0,5
15	Ketua/Anggota Partai	2	0,5
16	Pegawai Kontrak/Honorar	1	0,3
17	Rektor/Dekan/Dosen/Akademisi	1	0,3
18	Ajudan	1	0,3
TOTAL		372	100



TATA KELOLA SEKTOR BISNIS

SEBERAPA SERING TERJADI PEMBERIAN DI LUAR KETENTUAN RESMI?

Menurut Ibu/Bapak, apakah pemberian uang atau hadiah di luar ketentuan resmi oleh pebisnis atau pengusaha kepada pegawai pemerintah atau aparat negara sangat sering, sering, jarang, atau sangat jarang dilakukan? ... (%)

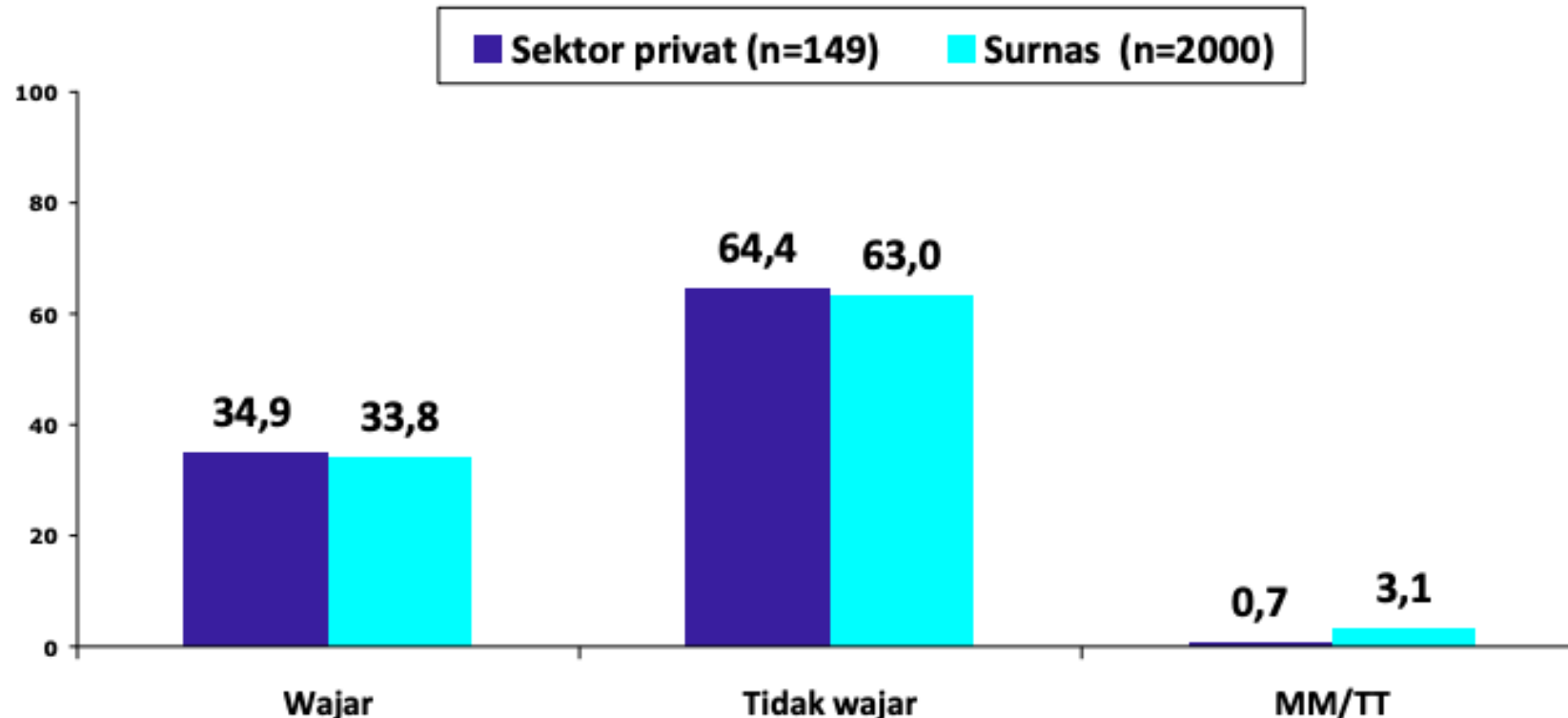


Sumber:
Lembaga
Survei
Indonesia, 2019



SIKAP TERHADAP PEMBERIAN DI LUAR KETENTUAN

Menurut pendapat Ibu/Bapak, apakah merupakan hal yang wajar atau tidak wajar bagi masyarakat Indonesia memberikan sesuatu seperti: uang, barang, hiburan, hadiah di luar persyaratan/ketentuan untuk memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintah? ... (%)



*Catatan: Surnas dilakukan pada 2000 responden yang dipilih secara random dari populasi nasional umur 19 tahun ke atas



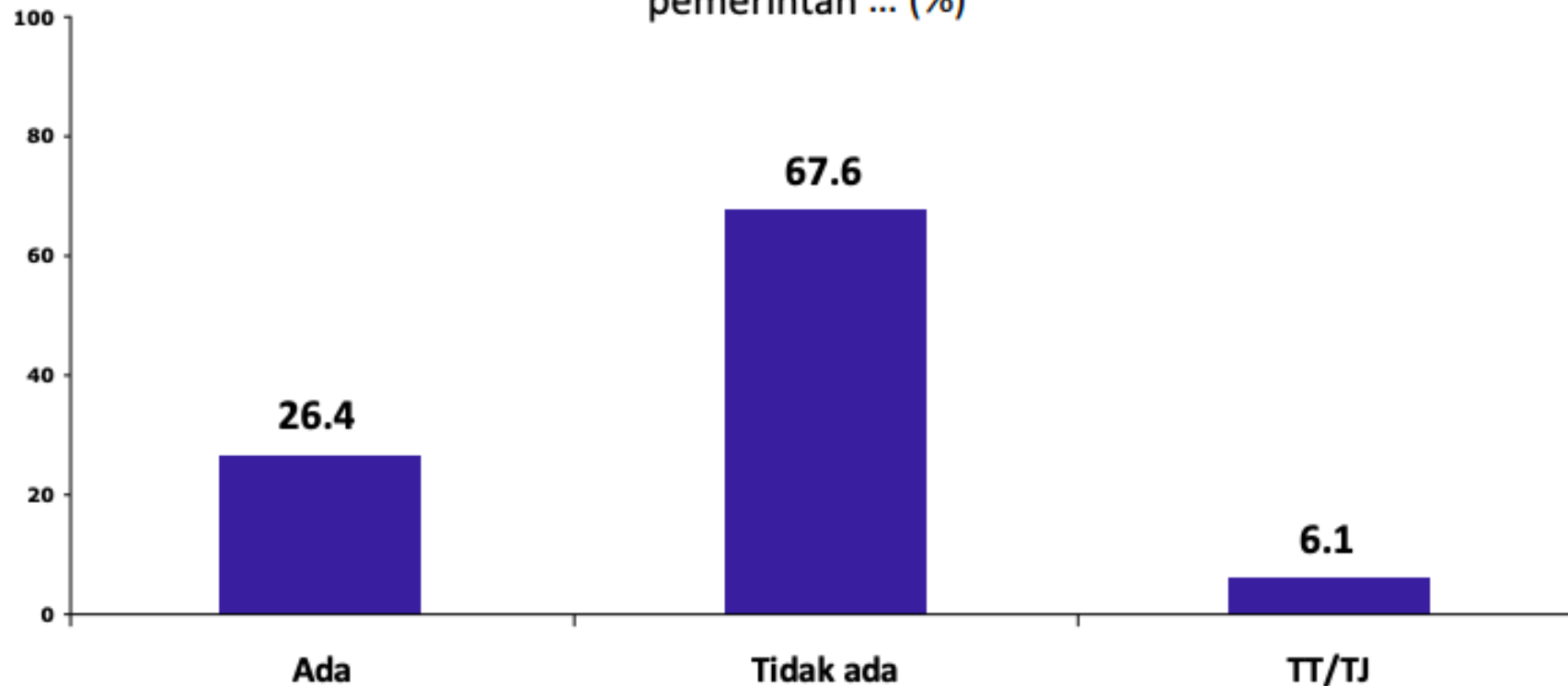
HAL YANG MEMPENGARUHI PEBISNIS MELAKUKAN SUAP

Seberapa berpengaruh hal-hal berikut ini menjadi penyebab pebisnis atau pengusaha memberi uang atau hadiah di luar ketentuan resmi kepada pegawai pemerintah atau aparat negara dalam sektor bisnis/lingkup pekerjaan Ibu/Bapak? Apakah sangat berpengaruh, cukup berpengaruh, kurang berpengaruh, sangat tidak berpengaruh? ... (%)



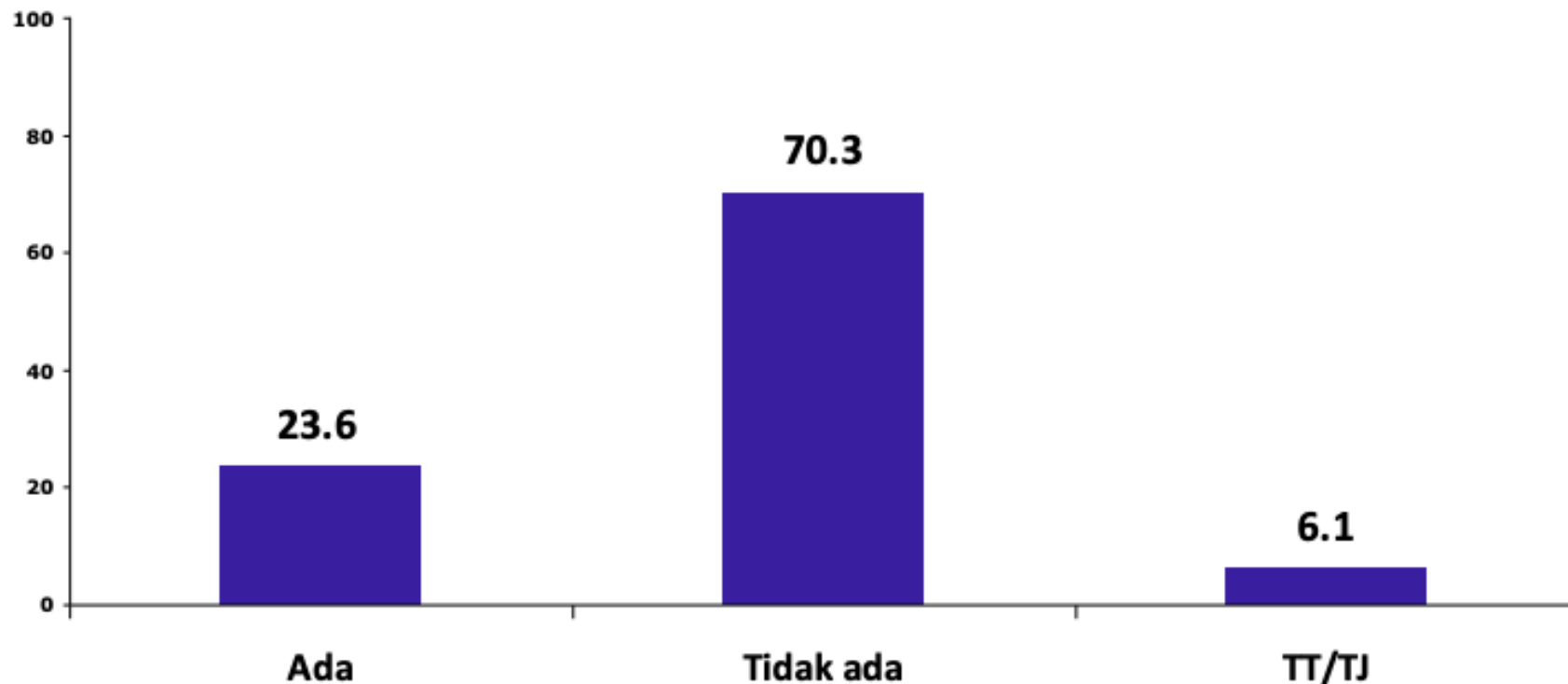
ATURAN PERUSAHAAN TENTANG KEWAJIBAN MELAPOR JIKA DIMINTA PUNGLI

Apakah di perusahaan Ibu/Bapak ada atau tidak aturan tertulis yang mewajibkan seluruh karyawan dan pemegang saham untuk melapor ke perusahaan jika mereka dimintai uang/hadiah/layanan personal tidak resmi oleh pegawai pemerintah ... (%)

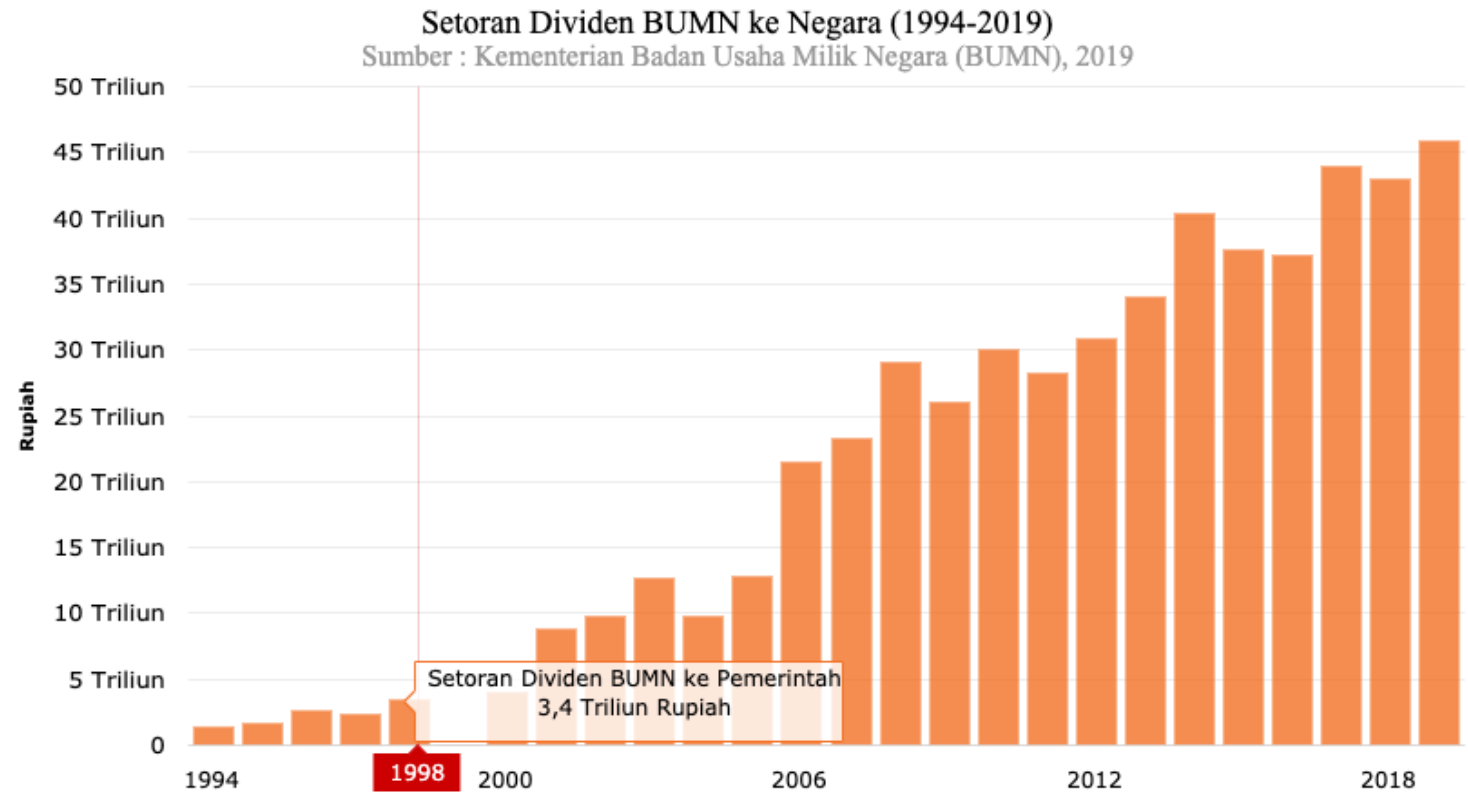


ATURAN PERUSAHAAN TENTANG LARANGAN MEMBERI SUAP/GRATIFIKASI

Apakah di perusahaan Ibu/Bapak ada atau tidak aturan tertulis yang melarang seluruh karyawan dan pemegang saham untuk memberikan uang/hadiah/layanan personal kepada pegawai pemerintah di luar ketentuan resmi yang berlaku? ... (%)



TATA KELOLA DAN KINERJA



Pada tiga tahun terakhir atau periode 2015-2018, kata Abra, PMN kepada BUMN sudah mencapai Rp 130,3 triliun. Mestinya, tutur Abra, besarnya nilai suntikan modal negara itu bisa berdampak positif untuk perbaikan kinerja BUMN.

"Ironisnya, di kala alokasi PMN sangat besar justru masih banyak BUMN yang menghadapi tekanan keuangan, yang pada gilirannya kembali membebani APBN," ujar Abra dalam diskusi online Indef, Ahad, 25 Agustus 2019. Namun, ia mengaku paham bahwa PMN untuk BUMN memiliki tujuan jangka panjang yang hasilnya kembali ke pemerintah dalam bentuk pajak, dividen dan lainnya.



BUMN MERUGI

RAPOR MERAH PERUSAHAAN NEGARA



Kementerian BUMN mencatat sebanyak 24 perusahaan pelat merah mengalami kerugian sebesar Rp 5,9 triliun selama semester I-2017. Nilai kerugian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.



Jumlah BUMN Rugi

Nilai kerugian
(Rp triliun)

Total Aset Seluruh BUMN
(Rp triliun)

	SEMESTER I (2016)	SEMESTER I (2017)
Jumlah BUMN Rugi	27	24
Nilai kerugian (Rp triliun)	5,8	5,9
Total Aset Seluruh BUMN (Rp triliun)	5.987	6.694

PENYEBAB KERUGIAN

- Beban kerugian masa lalu
- Kesalahan manajemen
- Turunnya harga komoditas
- Kalah bersaing dengan swasta

3 BUMN GO PUBLIC YANG MERUGI

Nilai laba (rugi) semester I (yoy)

Aneka Tambang



Garuda Indonesia



Krakatau Steel



SUMBER: KEMENTERIAN BUMN, GARUDA INDONESIA, TEMPO, ANTAM, KRAKATAU STEEL | NASKAH: WIDYANITA | DESAIN: DANI NURBIANTORO



12 BUMN MERUGI (2018)

- Jiwasraya (15,83 T)
- Krakatau Steel (1,15 T)
- BULOG (961 M)
- PT DI (961 M)
- PT PAL (304 M)
- PT DOK (272,87 M)
- PT SANG HYANG SERI (182,54 M)
- PT IGLAS (84,61 M)
- PT PERTANI (83,7 M)
- PT KERTAS KRAFT ACEH (75,11 M)
- PT VARUNA TIRTA (6,65 M)
- PT INDOFARMA (32,73 M)

Sumber: INFOBANK, 2018

KPK menetapkan **Direktur Utama PT PAL** Indonesia Budiman Saleh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran di **PT Dirgantara Indonesia (PT DI)** tahun 2007-2017. Nov 3, 2020



[Home / News / Nasional](#)

KPK Akan Periksa Eks Direktur PT DI sebagai Tersangka

Kompas.com - 03/11/2020, 11:01 WIB

[nasional.tempo.co > read > direktur-...](#) [Translate this page](#)

[Direktur PT Krakatau Steel Ditangkap KPK, Begini Pernyataan ...](#)

Mar 24, 2019 — Menurut Wakil Ketua **KPK** Saut Situmorang, satu dari tiga tersangka suap **PT Krakatau Steel**, Kurniawan Eddy, masih buron.

[www.medcom.id > Ekonomi > Bisnis](#) [Translate this page](#)

[Kerugian Negara Imbas Korupsi Jiwasraya Tembus Rp25 Triliun](#)

Aug 15, 2020 — Jakarta: Masyarakat Anti **Korupsi** Indonesia (MAKI) memperkirakan kerugian negara atas kasus dugaan korupsi di **PT Asuransi Jiwasraya** ...



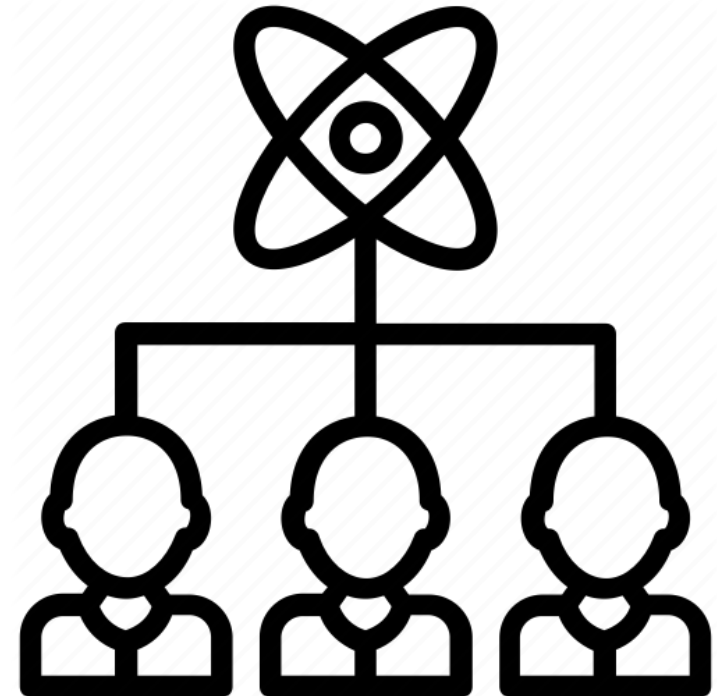
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)/ISO 37001

- Membantu perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi penyuapan
- Menyejajarkan diri dengan *values* yang dimiliki perusahaan – perusahaan global
- Terhindar dari kasus korupsi dan kerugian akibat investigasi oleh aparat penegak hukum yang dapat menurunkan reputasi perusahaan
- Perusahaan akan semakin meningkat kredibilitasnya baik di mata publik, pelanggan, dan investor dalam negeri maupun luar negeri
- Meminimalkan finansial lose dan meningkatkan finansial gain melalui berbagai upaya efisiensi.



SMAP DAN BUDAYA ANTI SUAP

- Tumbuhnya budaya antikorupsi/anti suap menjadi tujuan utama ISO SMAP. Jadi bukan sekedar mendapat sertifikat.
- Semua pihak wajib memahami dan menginternalisasi, nilai dan sistem SMAP.
- Untuk memaksa agar sistem dijalankan dan dikembangkan, SMAP diaudit secara berkala.
- Juga dibentuk fungsi kepatuhan anti penyuaan (FKAP).



MENGHINDARI SUAP (PRINSIP 4 NO'S)



No
Bribery

No
Kickback

No
Gift

No
Luxurious
Hospitality



